

# Awasi Perusahaan Nakal,

## Kemnaker Harus Terus Koordinasi dengan Daerah

Senin, 30 Oktober 2017 | 7:45

<http://sp.beritasatu.com/home/awasi-perusahaan-nakal-kemnaker-harus-terus-koordinasi-dengan-daerah/121164>



Gedung Kemnaker [google]

### Berita Terkait

- Laporan Keuangan Kemnaker Selalu Jelek
- April 2015, TKI Gunakan e-KTKLN
- Masih Ada PNS Makan Gaji Buta Di Kemnaker?
- Kemnaker Persingkat Pendaftaran Peraturan Dan Perjanjian Kerja Perusahaan

[JAKARTA] Untuk memastikan agar seluruh perusahaan di Indonesia mematuhi hukum terutama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (k3) maka pengawas ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus selalu berkoordinasi dengan pengawas ketegakerjaan yang berada di kabupaten dan provinsi.

"Pengawas Ketenagakerjaan di Kemnaker jangan hanya tunggu laporan. Harus proaktif. Jangan terima gaji buta," kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, kepada SP, Minggu (29/10).

Ia mengatakan seperti itu terkait kebakaran pabrik kembang api kawat PT Panca Buana Cahaya Sukses di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (26/10) malam, yang menewaskan 48 orang.

Menurut Timboel, kebakaran itu terjadi, pertama, kelalian dari pihak perusahaan. "Oleh karena itu, saya salut dengan polisi yang telah menahan pemilik perusahaan tersebut," kata dia.

Kedua, pihak pemerintah Provinsi Banten dengan mudahnya memberi izin kepada perusahaan untuk beroperasi tanpa dilengkapi peralatan dan sistem K3 terlebih dahulu.

Ketiga, lemahnya fungsi pengawas ketenagakerjaan yang berada di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten. Keempat, lemahnya koordinasi Kemnaker dengan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten dalam mengawasi perusahaan terutama dalam menjalan K3.

Timboel mengatakan, pihaknya sering mendengar kalau pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang tidak pernah menindaklanjuti laporan soal perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan undang-undang. "Kami sering melapor ke pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang. Namun tidak ditindaklanjuti. Karena itu, kami lapor ke Kemnaker eh juga tidak ditindaklanjuti. Belakangan kami dengar informasi kalau para pengawas itu memang suka meminta duit kepada perusahaan-perusahaan nakal di sana," kata dia.

Oleh karena itu, Timboel mendesak Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri agar segera menertibkan para pengawas ketenagakerjaan. "Para pengawas ketenagakerjaan yang berada di Kemnaker harus sering tutun ke lapangan. Kalau ada laporan segera ditindaklanjuti," kata dia.

Timboel sepakat dengan usulan Kemnaker agar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja direvisi. Pasalnya, sanksi yang diatur dalam UU tersebut sangat ringan yakni cuma kurungan selama tiga bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp 100.000.

Bahkan Timboel mengusulkan, agar seluruh pengawas ketenagakerjaan bertanggung jawab dan dikomandoi oleh Menteri Ketenagakerjaan. "Supaya efektif, lebih baik pengawas ketenagakerjaan bertanggung jawab vertikal sampai Kemnaker saja. Jangan beri ke daerah. Parah," kata Timboel.

Pada Minggu (29/10) sore, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mendatangi lokasi terjadinya kebakaran di pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses di Tangerang, Banten.

Kedatangan Hanif ini disayangkan oleh para pekerja. Pasalnya, kejadiannya telah terjadi empat hari lalu, Hanif baru datang ke lokasi. Padahal, anggota DPR dan sejumlah pihak begitu kejadian langsung datang. "Giliran polisi sudah menetapkan tersangka Menteri Hanif baru turun ke lapangan. Kenapa tidak dari kemarin ? Padahal beliau Menteri Ketenagakerjaan. Sayang sekali," kata Danang Saputra, buruh yang bekerja di Tangerang.

Hal senada disampaikan Rita Hapsari, pekerja lainnya. "Seharusnya Menteri Ketenagakerjaan datang pas kejadian. Bukan sudah beberapa hari kemudian seperti ini," kata anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ini.

Hanif mengatakan, berdasarkan laporan polisi pabrik kembang api tersebut tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Bahkan bangunan pabrik lebih layak disebut gudang.

Hanif menegaskan sudah menginstruksikan jajaran pengawas ketenagakerjaan untuk mengusut tuntas kasus ledakan ini. Kecelakaan kerja sering diakibatkan oleh kurangnya kesadaran pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai budaya di lingkungan kerja. [E-8]